



**PENERAPAN KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
PADA PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA**

(Studi pada Proyek Infrastruktur di Wilayah Kerja Balai Jasa Konstruksi

Wilayah I Banda Aceh)



1. Dr. Khairani, S.H., M.H.
2. Dr. Syofiarti, S.H., M.H.

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2025

**PENERAPAN KEBIJAKAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI
PADA PROYEK KONSTRUKSI DI INDONESIA
(Studi pada Proyek Infrastruktur di Wilayah Kerja Balai Jasa Konstruksi
Wilayah I Banda Aceh)**

**(T. Zikril Fallach, NIM. 2320119011, Program Studi Magister Ilmu
Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 2025)**

ABSTRAK

Kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proyek konstruksi merupakan langkah pemerintah dalam mendorong daya saing industri nasional dan mengurangi ketergantungan pada produk impor. Pada proyek infrastruktur yang dibiayai APBN/APBD, ketentuan TKDN merupakan kewajiban hukum yang bersumber dari Undang-Undang No. 3 Tahun 2014 dan dituangkan juga di dalam Perpres No 12 Tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran TKDN, dengan fokus pada wilayah kerja Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-empiris, dengan teknik analisis deskriptif-kualitatif berdasarkan studi dokumen verifikasi TKDN dan wawancara dengan PPK, verifikator, dan penyedia jasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari lima proyek strategis yang diteliti, dua proyek tidak memenuhi nilai TKDN minimum (0% dan 27,86%), namun tidak dikenai sanksi administratif sebagaimana diatur dalam regulasi. Ketidakpatuhan ini mencerminkan lemahnya penegakan hukum administratif dan kegagalan negara dalam melaksanakan prinsip legalitas dan akuntabilitas. Analisis dengan teori pertanggungjawaban hukum menegaskan bahwa penyedia jasa seharusnya dimintai tanggung jawab baik secara administratif maupun kontraktual, terlepas dari ada atau tidaknya unsur kesengajaan. Namun, pendekatan simbolik dan minimnya mekanisme penegakan sanksi menyebabkan kebijakan TKDN belum efektif mengubah perilaku pelaku usaha. Penguatan sistem verifikasi, pemberdayaan pejabat pengadaan, serta penerapan sanksi yang konsisten diperlukan agar TKDN menjadi kebijakan instrumental, bukan sekadar simbolik dalam sistem pengadaan nasional.

Kata Kunci: Kebijakan TKDN, Proyek Konstruksi, Pertanggungjawaban Pelaku Usaha, Balai Jasa Konstruksi.

**IMPLEMENTATION OF DOMESTIC COMPONENT LEVEL (TKDN)
POLICY IN CONSTRUCTION PROJECTS IN INDONESIA
(A Study on Infrastructure Projects in the Working Area of the Balai Jasa
Konstruksi Wilayah I Banda Aceh)**

**(T. Zikril Fallach, NIM. 2320119011, Master of Law Studies
Program, Faculty of Law, Andalas University, 2025)**

ABSTRACT

The Domestic Component Level (TKDN) Policy in construction projects represents a government initiative to enhance national industrial competitiveness and reduce dependence on imported products. In infrastructure projects funded by the state/regional budget (APBN/APBD), TKDN requirements constitute a legal obligation derived from Law No. 3 of 2014 and stipulated in Presidential Regulation No. 12 of 2021. This research aims to analyze the legal accountability of construction service providers for TKDN violations, focusing on the working area of Balai Jasa Konstruksi Wilayah I Banda Aceh. The approach used is juridical-empirical, with descriptive-qualitative analysis techniques based on TKDN verification document studies and interviews with procurement officials, verifiers, and service providers. The research findings indicate that out of five strategic projects studied, two projects failed to meet the minimum TKDN value (0% and 27.86%), no administrative sanctions were imposed as stipulated in the regulations. This non-compliance reflects weak administrative law enforcement and the state's failure to implement the principles of legality and accountability. Analysis using legal accountability theory confirms that service providers should be held responsible both administratively and contractually, regardless of whether intentional elements exist. However, the symbolic approach and minimal sanction enforcement mechanisms have prevented the TKDN policy from effectively changing business actors' behavior. Strengthening the verification system, empowering procurement officials, and implementing consistent sanctions are necessary for TKDN to become an instrumental policy rather than merely symbolic in the national procurement system.

Keywords: TKDN Policy, Construction Projects, Business Actor Accountability, Construction Services Center.